

TUGAS AKHIR

**IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



DI SUSUN OLEH :

ANJELI

21011702

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA MANAJEMEN
SEKOLAH TINGGI ILMU BISNIS KUMALA NUSA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Implementasi Program Jaminan Sosial Di Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Anjeli

Nim : 21011702

Program Studi : Manajemen

Tugas Akhir ini telah di setujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Program Studi Diploma Tiga Manajemen STIB Kumala Nusa pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 17 April 2024

Mengetahui

Dosen Pembimbing



Nindyah Pratiwi, S.pd., M.Hum
NIK. 11700119

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL DI DINAS SOSIAL
DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA

Laporan Tugas Akhir ini telah di ajukan pada Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa untuk memenuhi persyaratan akhir Pendidikan pada Program Studi Diploma tiga Manajemen:

Disetujui dan di sahkan pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 17 April 2024

Tim Penguji

Ketua



Sarjita, SE.MM
NIK. 11300114

Anggota



Fitriani Mutohharoh, SE, MM
NIK. 12000202

Mengetahui

Ketua STIB Kumala Nusa



Anung Pramudyo, S.E., M.M
NIP. 19780204 200501 1 002

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anjeli

NIM : 21011702

Judul Tugas Akhir : Implementasi Program Jaminan Sosial Dinas Sosial
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah diterbitkan oleh pihak manapun kecuali tersebut dalam referensi dan bukan merupakan hasil karya orang lain sebagian maupun secara keseluruhan. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ada yang mengklaim bahwa karya ini milik orang lain dan dibenarkan secara hukum, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum.

Yogyakarta, 17 April 2024

Yang membuat pernyataan



Anjeli

MOTO

"Langkahku ditetapkan oleh Tuhan, dan Ia berkenan pada jalanku. Sekalipun aku jatuh, aku tidak akan tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku".

Mazmur 37:23-24.

HALAMAN PESEMBAHAN

Dengan sembah sujud syukur yang terdalam, Penulis persembahkan kepada :

1. Yang Mahakuasa Tuhan Yesus Kristus. Atas kasih karunia, rahmat, dan penyertaan-Nya yang tiada henti, saya diberi kekuatan, ketabahan, dan hikmat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bunda Maria, Sebagai Bunda Gereja dan Bunda kami semua. Karya ini adalah hasil dari usaha dan doa. Meskipun masih jauh dari sempurna, saya persembahkan sebagai tanda kasih dan devosi saya kepada Bunda.
3. Kedua orang tua, Mas Eko dan Kak Maria yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materi serta do'a yang tiada hentinya.
4. Bapak Anung Pramudya, S.E., M.M Selaku Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa.
5. Ibu Nindyah Pratiwi, S.Pd.,M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Penulis
6. Bapak dan Ibu Dosen STIB Kumala Nusa yang senantiasa memberikan Ilmu kepada Penulis.
7. Teman-Teman Seperjuangan Risma, Kuni dan seluruh kelas B yang senantiasa selalu mendorong dan memotivasi penulis.
8. Ratnama Anakya Cetta Susanto dan mas Loys yang senantiasa Menemani Saya setiap hari.
9. Keluarga Besar Bapak Marsianus Pijar.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan Judul “Implementasi Program Jaminan Sosial di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Tugas Akhir merupakan satu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk mencapai derajat Ahli Madya Manajemen Pada Program Studi Diploma III Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Anung Pramudyo, S.E., M.M selaku Direktur Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa.
2. Ibu Nindyah Pratiwi, S.Pd.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing Penulis
3. Bapak dan Ibu Dosen STIB Kumala Nusa yang senantiasa memberikan Ilmu kepada Penulis.
4. Semua Pihak yang telah mendukung, memotivasi dan mendoakan Penulis.

Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan sumbangan untuk
pengembangkan Ilmu dan pengetahuan bagi setiap pembaca.

Yogyakarta, 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Anjeli', written in a cursive style.

Anjeli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
DAFTAR TABEL	XI
DAFTAR LAMPIRAN	XII
ABSTRAK	XIII
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. MANFAAT PENELITIAN	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. LANDASAN TEORI.....	6
B. KONSEP JAMINAN SOSIAL	11
C. DINAS SOSIAL	15

BAB III METODE PENELITIAN	
A. JENIS PENELITIAN	16
B. WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN	19
C. JENIS DATA	20
D. METODE PENGUMPULAN DATA.....	20
E. METODE ANALISIS DATA.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. GAMBARAN UMUM.....	27
B. HASIL PENELITIAN	29
C. PEMBAHASAN.....	45
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	60
B. SARAN.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Tabel Personalia.....	42
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegunaan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Namun, program ini juga menghadapi beberapa tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan anggaran.

Kata Kunci : *Program Jaminan Sosial, Dinas Sosial*

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengimplementasikan berbagai program jaminan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih terdapat berbagai kendala dalam implementasi program-program tersebut. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain rendahnya tingkat partisipasi masyarakat, kurangnya pemahaman akan manfaat program, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Tingginya tingkat kemiskinan dan ketimpangan sosial di DIY juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi program jaminan sosial. Selain itu, adanya perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, seperti pertumbuhan jumlah penduduk, urbanisasi, dan perubahan struktur demografi, juga menuntut adanya penyesuaian dalam implementasi program-program jaminan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program jaminan sosial di DIY.

Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah tersebut dan merumuskan

kebijakan pembangunan sosial guna mengatasi berbagai risiko sosial yang dihadapi oleh masyarakat, seperti risiko kehilangan pendapatan, sakit, cacat, dan meninggal dunia.

Dalam konteks otonomi daerah, implementasi program jaminan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam beberapa tahun terakhir, Dinas Sosial DIY telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan jaminan sosial bagi masyarakat.

Namun, hingga saat ini masih terdapat sejumlah kendala dalam implementasi program jaminan sosial di DIY yang perlu diidentifikasi dan diatasi secara komprehensif. kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut, seperti:

1. Keterbatasan anggaran: Anggaran yang tersedia untuk program jaminan sosial masih terbatas, sehingga tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat terlayani.
2. Pendataan yang belum optimal: Pendataan masyarakat miskin dan rentan masih belum optimal, sehingga masih ada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan.
3. Kurangnya koordinasi: Koordinasi antara berbagai lembaga penyelenggara program jaminan sosial masih perlu ditingkatkan

Sedangkan Jaminan sosial adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap risiko sosial dan ekonomi. Di Indonesia, program jaminan sosial diselenggarakan oleh

berbagai lembaga, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga swasta. Program ini diselenggarakan oleh berbagai lembaga, antara lain:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
2. BPJS Ketenagakerjaan
3. Kementerian Sosial

Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), program jaminan sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial DIY. Program-program tersebut meliputi:

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): Program ini memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia, termasuk penduduk DIY.
2. Bantuan Sosial (Bansos): Program ini memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan rentan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
3. Rehabilitasi Sosial: Program ini membantu masyarakat yang mengalami masalah sosial, seperti anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
4. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial (BANSOS) Dan Rehabilitasi Sosial

Program-program jaminan sosial tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY?

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh penulis dalam penulisan Tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa terutama pada bidang jaminan sosial.
 - b. Membangun jaringan dengan bertemu berbagai orang di dalam lingkungan tempat Penelitian.
 - c. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri secara profesional.
 - d. Mahasiswa dapat mengaplikasikan Ilmu yang dapat di perkuliahan.

2. Bagi Dinas sosial Daerah istimewa Yogyakarta
Memberikan masukan kepada Dinas Sosial DIY untuk meningkatkan implementasi program jaminan sosial.
3. Bagi Sekolah Tinggi Ilmu Bisnis Kumala Nusa Yogyakarta
 - a. Menjadi masukan untuk mengevaluasi sejauh mana mahasiswa memahami materi apa saja yang di dapatkan di perkuliahan.
 - b. Menerapkan Pengalaman yang telah di peroleh di perkuliahan.
 - c. Mendapatkan masukan yang berguna untuk menyempurnakan Kurikulum yang sesuai dengan program Kampus Merdeka.
4. Bagi Masyarakat
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Mewujudkan Keadilan Sosial dan Pemerataan Kesejahteraan.
 - c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat.
 - d. Meningkatkan Produktivitas dan daya saing tenaga kerja.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Konsep Implementasi kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik adalah tahap krusial dalam keberhasilan sebuah program atau kebijakan. Hill dan Hupe (2009) menyebutkan bahwa implementasi kebijakan melibatkan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk menerjemahkan keputusan kebijakan menjadi tindakan konkret yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut Matland dan Termeer (2019) Konsep ini mengacu pada kapasitas organisasi atau sistem dalam mengimplementasikan kebijakan, termasuk aspek sumber daya manusia, keuangan, teknis, dan politik.

Menurut Soekanto (2019) partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan dukungan terhadap program, sehingga meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Penyuluhan dan sosialisasi program jaminan sosial menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program yang ada. Penyuluhan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat manfaat tentang manfaat dan mekanisme program sehingga dapat meningkatkan partisipasi

Hupe dan Hill (2019) juga menyoroti pentingnya koordinasi antar instansi dalam mengimplementasikan kebijakan dan menekankan bahwa gaya pelaksanaan yang efektif sering kali melibatkan kolaborasi dan koordinasi yang baik antar berbagai pihak.

Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen, dapat mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi program. Teknologi informasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program jaminan sosial (Soekanto, 2019).

Bovens et al. (2016) menyatakan pentingnya monitoring *and* evaluation regimes dalam mengukur kinerja dan efektivitas kebijakan publik, termasuk program-program jaminan sosial, dan menekankan bahwa monitoring dan evaluasi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kebijakan.

Dari beberapa teori para Ahli di atas maka dapat disimpulkan pendapat bahwa implementasi kebijakan publik, khususnya dalam program jaminan sosial, merupakan proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor.

Faktor-faktor tersebut meliputi karakteristik kebijakan, organisasi, dan masyarakat yang mempengaruhi jalannya implementasi.

Partisipasi masyarakat, penyuluhan, koordinasi antar instansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi dan monitoring

program merupakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan sosial.

Dengan memperhatikan semua faktor ini, diharapkan implementasi program jaminan sosial dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

2. Konsep Implementasi Program

a. Definisi Implementasi Program

Menurut Hill, M., & Hupe, P. (2009) Implementasi Program adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh organisasi-organisasi pemerintah, individu-individu, dan sektor-sektor masyarakat lainnya, yang diarahkan untuk menerapkan kebijakan yang telah diadopsi.

Suatu proses yang sistematis dan terencana untuk mewujudkan ide, gagasan, atau rencana yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata. Implementasi program ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nurdin Usman (2017).

Berdasarkan Pendapat beberapa para ahli di atas dapat ditarik kesimpulannya bahwa Implementasi program adalah suatu proses penerapan kebijakan yang kompleks dan *multidimensional* yang melibatkan berbagai aktor dan faktor. Implementasi tidak hanya sebatas pada pelaksanaan program dan kegiatan, tetapi juga

termasuk pada proses pembuatan kebijakan, perumusan strategi, dan pengalokasian sumber daya.

Implementasi program merujuk pada proses menjalankan dan melaksanakan program atau kebijakan yang telah dirancang. Proses ini mencakup langkah-langkah konkret atau nyata untuk menerapkan program tersebut, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.

b. Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Menurut beberapa para Ahli ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Antara lain :

1) Kompleksitas kebijakan

Kebijakan yang kompleks dan *multi-faceted* lebih sulit untuk diimplementasikan dibandingkan dengan kebijakan yang sederhana dan terfokus (Van Meter dan Van Horn, 2015).

2) Konteks implementasi

Konteks di mana kebijakan diimplementasikan, seperti budaya lokal, norma sosial, dan struktur politik, dapat *significantly impact its effectiveness* (Mazmanian dan Sabatier, 2019).

3) Adaptasi dan pembelajaran

Implementasi kebijakan yang sukses membutuhkan adaptasi dan pembelajaran yang berkelanjutan. Para

pelaksana kebijakan harus bersedia untuk menyesuaikan pendekatan mereka dengan situasi yang berubah dan belajar dari pengalaman. (Pressman dan Wildavsky, 2017)

4) Engagement pemangku kepentingan

Melibatkan pemangku kepentingan utama dalam proses implementasi kebijakan dapat meningkatkan peluang keberhasilan. (Koehler et al., 2016)

5) Penggunaan teknologi

Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi kebijakan. (Fountain, 2018)

6) Akuntabilitas dan transparansi

Akuntabilitas dan transparansi yang kuat dalam proses implementasi kebijakan dapat membangun kepercayaan dan meningkatkan dukungan publik. (Van den Heuvel, 2015)

7) Kemampuan adaptasi terhadap perubahan

Kemampuan organisasi dan para pelaksana kebijakan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kondisi yang tidak terduga sangat penting untuk keberhasilan implementasi. (Gronnoet et al., 2018)

8) Keterampilan dan pengetahuan para pelaksana

Keterampilan dan pengetahuan para pelaksana kebijakan yang memadai tentang kebijakan dan konteks implementasinya sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal. (Lindquist et al., 2016).

9) Kepemimpinan yang visioner dan *transformatif*

Kepemimpinan yang visioner dan *transformatif* dapat memotivasi dan menginspirasi para pelaksana kebijakan untuk bekerja keras dan mencapai tujuan yang ambisius. (Bass dan Avolio, 2015).

10) Budaya organisasi yang suportif

Budaya organisasi yang suportif dan kolaboratif dapat memfasilitasi komunikasi yang terbuka, berbagi informasi, dan pengambilan keputusan yang efektif, yang semuanya berkontribusi pada implementasi kebijakan yang sukses. (O'Reilly dan Chatman, 2016)

B. KONSEP JAMINAN SOSIAL

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Jaminan sosial adalah jaminan yang diberikan oleh negara kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Jaminan sosial ini mencakup perlindungan dalam bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepesertaan program jaminan sosial lainnya. Jaminan sosial adalah suatu program atau sistem yang memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, ketenagakerjaan, dan kecelakaan. Jaminan Sosial memiliki tiga fungsi utama, yaitu proteksi, pencegahan, dan promosi kesejahteraan sosial (Soekanto, S. 2010).

Menurut Handayani (2023) Jaminan Sosial adalah sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan prinsip asuransi sosial untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat terhadap risiko sosial.

Asuransi sosial dalam definisi ini berarti iuran peserta digunakan untuk membiayai manfaat yang diberikan kepada peserta yang membutuhkan. Sedangkan secara umum, jaminan sosial dapat diartikan sebagai sistem perlindungan sosial yang disediakan oleh negara atau lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan finansial atau non-finansial kepada individu atau keluarga yang memerlukan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan dari pendapat para Ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa Jaminan Sosial adalah suatu program atau sistem yang memberikan perlindungan kepada masyarakat, terutama dalam hal kesehatan, ketenagakerjaan, dan kecelakaan. Jaminan sosial memiliki tiga fungsi utama, yaitu proteksi, pencegahan, dan promosi kesejahteraan sosial.

Selain itu, jaminan sosial juga dapat diartikan sebagai sistem perlindungan sosial yang disediakan oleh negara atau lembaga lainnya untuk

memberikan perlindungan finansial atau non-finansial kepada individu atau keluarga yang memerlukan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketidakpastian ekonomi.

1. Sejarah dan Perkembangan Sistem Jaminan Sosial di Indonesia

Menurut (Setiawan, B., & Usman, S. (2017) Sistem Jaminan Sosial (SJS) di Indonesia memiliki sejarah panjang dan telah mengalami beberapa kali perubahan. Berikut adalah beberapa periode penting dalam perkembangan SJS di Indonesia.

Pada awal Tahun 1900-an Lahirnya berbagai badan usaha sosial dan dana pensiun swasta untuk membantu pekerja. Tahun 1933 Didirikannya Sociale Verzekeringsbank (SVB) oleh pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan jaminan sosial kepada pegawai negeri.

Pada awal Kemerdekaan Tahun 1945-1960 Berbagai upaya dilakukan untuk membangun Sistem Jaminan Sosial, namun belum terstruktur dan terkoordinasi dengan baik.

Dan pada Tahun 1960-1990 Didirikannya beberapa program jaminan sosial, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk pekerja di sektor formal. Krisis ekonomi mendorong pemerintah untuk merumuskan SJS yang lebih komprehensif pada tahun 1998.

Pada Periode Reformasi Tahun 2004 Disahkannya UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sebagai landasan hukum SJS di Indonesia.

Dan Tahun 2011 Didirikannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, untuk mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).

Tahun 2014 JKN mulai berlaku secara nasional. Saat ini Sistem Jaminan Sosial di Indonesia terus berkembang dengan cakupan kesertaan yang semakin luas dan manfaat yang semakin beragam.

2. Peraturan Perundang-undangan tentang Jaminan Sosial

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Sistem Jaminan Sosial di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Mengamanatkan negara untuk melindungi dan menyejahterakan rakyatnya.
- 2) UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN: Menetapkan kerangka dasar SJS di Indonesia, termasuk tujuan, asas, dan penyelenggaraannya.
- 3) UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS: Menetapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggara program JKN dan Jamsostek.
- 4) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden: Mengatur lebih lanjut tentang penyelenggaraan program JKN dan Jamsostek.

C. DINAS SOSIAL

Menurut UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan sosial (Soetomo 2008). Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan sosial.

Menurut Soetjipto (2010) Dinas Sosial adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Dinas Sosial adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan pengertian dari para Ahli di atas maka dapat di simpulkan bahwa Dinas Sosial Merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan kebijakan dan program di bidang kesejahteraan sosial dan pemberi pelayanan sosial kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah yang di teliti, maka Jenis metode yang di gunakan pada penelitian ini adalah studi deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Adapun yang di maksud dengan Penelitian Deskriptif adalah suatu metode yang di lakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan sekarang atau sedang berlangsung.

Menurut Sugiono (Naharoh, 2008) Metode penelitian adalah cara Ilmiah untuk mendapatkan data-data dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui deskripsi tentang kegunaan program jaminan sosial yang di laksanakan oleh dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maka Metode penelitian yang akan di terapkan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan Kualitatif.

1. Metode Deskriptif

Metode penelitian merupakan suatu cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya agar diperoleh suatu kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian.

Metode penelitian adalah upaya untuk mencari kebenaran secara ilmiah yang didasarkan pada yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Di samping itu untuk memperoleh kebenaran ilmiah, metode penelitian juga merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian secara efektif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai keadaan yang terjadi pada masa sekarang atau yang sedang berlangsung.

2. Pendekatan Kualitatif

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan penelitian yang menjawab permasalahan penelitiannya, memerlukan pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai obyek yang diteliti, untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan.

Model kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivesme*, digunakan untuk meneliti apa kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengembalian sampel sumber data dilakukan secara *purposive*. Menurut Bogdan & Moleong, Lexy J, (2009) bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

(Davis Williams & Moleong, Lexy J, 2009) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti secara alamiah.

(Denzin dan Lincoln & Moleong, Lexy J, 2009) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena Yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Selanjutnya Moleong, Lexy J (2009) menyintesis Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. ,secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Creswell (2014) penelitian kualitatif sebagai pendekatan penelitian yang berfokus pada pengalaman manusia dan menghasilkan data deskriptif. Creswell menekankan pentingnya penelitian kualitatif dalam memahami makna yang dibentuk oleh individu dan kelompok sosial.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Penelitian ini dilakukan kepada penerima bantuan dan pegawai Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada bidang Jaminan Sosial. Penelitian ini membahas mengenai implementasi program jaminan Sosial dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 dan 15 maret 2024 di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. JENIS DATA

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2009) data primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya data yang dipilih oleh responden melalui Kuesioner atau data hasil wawancara dengan Sumber.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY. Untuk mencapai tujuan ini, peneliti melakukan wawancara semi-terstruktur dengan 2 petugas Dinas Sosial DIY dan 1 penerima manfaat program. Pertanyaan wawancara dikembangkan berdasarkan lampiran pertanyaan. Wawancara dilakukan di lokasi Dinas Sosial DIY.

Adapun Hasil dari Wawancara tersebut menunjukkan bahwa program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY telah berhasil

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan program, seperti keterbatasan anggaran, SDM, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2009) data Sekunder adalah Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari:

- a. Dokumen resmi Dinas Sosial DIY
- b. Laporan program di Website Dinas Sosial DIY
- c. Studi terdahulu terkait.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Tahapan penting dalam penelitian ini adalah pengumpulan data. Menurut Dja'an Sotori dan Aan Komariah (2009) mengumpulkan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan satu langkah garis besar dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data., tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka penelitian ini tidak memenuhi standar yang di tetapkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, teknik observasi dan teknik studi dokumen.

1. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dan responden peneliti. Tanya jawab yang dilakukan bertujuan untuk mengambil keterangan, informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui proses komunikasi secara langsung dengan sumber-sumber data. Komunikasi yang dilakukan dalam bentuk dialog secara lisan atau sering disebut metode tanya jawab dengan sumber data penelitian.

Di dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Agus Penerima bantuan, Annisa Tresnasari selaku pelaksana program jaminan sosial dan Ignatius Sukampto selaku kepala bidang jaminan sosial.

Berg Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2009) menyatakan wawancara sebagai suatu percakapan dengan suatu tujuan, khususnya tujuan untuk mengumpulkan informasi.

Sudjana Djam'an Satori dan Aan Komariah, (2009) wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya dengan pihak yang ditanya atau penjawab.

2. Observasi

Syaodin N (Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2009:105) menyatakan bahwa observasi (*observation*) atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Hammersley & Atkinson (2007) mengklasifikasikan observasi menjadi beberapa macam, yaitu:

a. Observasi Partisipatif

Orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka dukanya.

Dalam observasi partisipatif ini maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak.

Dalam observasi ini peneliti terlibat, peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

b. Observasi Tidak Terstruktur

Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan.

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan teknik observasi terstruktur dan terencana sebagai pendukung teknik wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Ini didasarkan karena observasi yang dilakukan peneliti telah melalui perijinan terlebih dahulu serta rencana sehingga sumber data mengetahui pengamatan yang dilakukan oleh peneliti namun peneliti juga akan memastikan atau mengecek apakah hasil wawancara itu benar adanya.

3. Studi Dokumentasi

Sugiyono (2007) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya kalau didukung oleh studi dokumen yang sah. Dalam penelitian studi dokumen akan mendukung hasil dari wawancara dan observasi.

Jadi ketiga teknik pengumpulan data ini akan saling melengkapi dan mendukung oleh karena itu peneliti memakai teknik wawancara, observasi dan studi dokumen pengumpulan data.

E. TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data adalah proses mengorganisir, mengelompokkan, menginterpretasi, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan dalam

rangka memahami fenomena yang diteliti. Analisis data dalam penelitian merupakan salah satu langkah yang penting dan sangat menentukan.

Analisis data adalah rangkaian kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikan sehingga di peroleh temuan berdasarkan fokus atau rumusan masalah yang ingin di jawab.

Sugiono (2007) mengemukakan bahwa Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumen.

Dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pelajari oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama tahapan analisis data selama proses dilapangan dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data.

Analisis ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi program jaminan sosial berlangsung di Dinas Sosial DIY. Adapun Pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Tampilan/Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam hal ini Braun dan Clarke (2006) memperkenalkan metode analisis tematik, yang menggunakan teks naratif untuk menyajikan temuan penelitian. Metode ini melibatkan identifikasi, pengkodean, dan analisis tema dalam data kualitatif.

3. Kesimpulan / Verifikasi

Langkah Ketiga Dalam Analisis Bisnis Kualitatif Menurut Miles dan Huberman adalah Penarikan Kesimpulan Dan Verifikasi.

Ketiga Tahapan Kegiatan Analisis Ini Saling Berhubungan Satu Dengan Yang Lain Dan Berlangsung Secara *continue* Selama Penelitian Dilakukan

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Sejarah Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial DIY yang pada awalnya bernama Dinas Sosial Provinsi DIY berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Adapun latar belakang pembentukan Dinas sosial ini adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Cakupan kewenangan penyelenggaraan kesejahteraan sosial Dinas Sosial DIY meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Dinas Sosial DIY dibentuk dengan tujuan membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

2. Visi Misi, Tujuan Dan Moto Dinas Sosial.

a. Visi : “ Mewujudkan Kemandirian Dan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks)Yang Berkarakter Dan Berbudaya” Dalam Upaya Mendukung Visi

Gubernur DIY Periode 2017-2022 Yaitu “ Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

b. Misi :

- 1) Menyelenggarakan Rehabilitasi, perlindungan pemberdayaan dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (pmks) Agar berdaya dan berfungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin.
- 2) Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial (psks) dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan menanamkan rasa nasionalisme, kesetiakawanan dan restorasi sosial

c. Tujuan :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi, perlindungan, pemberdayaan dan jaminan sosial bagi PMKS guna memulihkan dan meningkatkan fungsi sosial dalam mencapai kemandirian (misi 1)
- 2) Peningkatan kapasitas dan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial (misi 2)

d. Moto : “ Melayani Dengan Hati, Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Untuk Masyarakat Yogyakarta Yang Sejahtera, Mandiri Dan Bermartabat”.

B. HASIL PENELITIAN

1. Program Jaminan Sosial di Dinas Sosial DIY

Program jaminan sosial di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencakup berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Beberapa program, Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti bantuan sosial tunai, bantuan pangan, bantuan pakaian, dan bantuan lainnya. Bantuan ini diberikan secara teratur atau dalam situasi khusus, seperti dalam kondisi bencana alam atau pandemi.

a. Program Jaminan Kesehatan

Program ini menyediakan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terdaftar Program jaminan kesehatan dapat mencakup biaya pemeriksaan medis, obat-obatan, dan perawatan di rumah sakit.

b. Program Jaminan Sosial Lainnya

Selain program bantuan sosial dan jaminan kesehatan, Dinas Sosial DIY juga menyelenggarakan program-program jaminan sosial lainnya, seperti program jaminan pensiun bagi pekerja formal, program perlindungan sosial bagi anak-anak dan lansia, serta program-program lain yang bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

Hal tersebut di buktikan dari jawaban Bapak Agus seorang warga DIY Pada saat di wawancara, menyatakan bahwa “program Jaminan Kesehatan dan Sosial di DIY telah sangat membantunya dan keluarganya. Beliau mengatakan bahwa program ini telah memberikannya akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, serta bantuan sosial yang dibutuhkannya”.

Program-program ini dirancang untuk mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, hingga akses terhadap pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial. Dengan adanya program-program ini, diharapkan kesejahteraan sosial masyarakat DIY dapat terus meningkat.

2. Implementasi Program Jaminan Sosial Di Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial DIY Sebagai daerah otonom, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kebijakan sendiri dalam mengelola program jaminan sosial. Evaluasi terhadap implementasi program jaminan sosial di DIY dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi program tersebut.

Ibu Annisa Tresnari menyatakan pada saat di wawancara bahwa “Dinas Sosial DIY memiliki beberapa program antara lain bantuan Sosial, bantuan Kesehatan, Bantuan rehabilitasi sosial, bantuan perlindungan Anak, bantuan Perlindungan Lansia, Bantuan Perlindungan Penyandang Disabilitas dan bantuan Bencana”. Berikut jenis bantuan dan cara mengimpelmntasikannya :

- a. Bantuan Sosial (BANSOS)
 - 1) Jenis bantuan:
 - a) Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 - b) Program Keluarga Harapan (PKH)
 - c) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
 - d) Bantuan Stimulan Program Keluarga Harapan (BST PKH)
 - e) Bantuan Sosial Tunai (BST)
 - f) Bantuan Modal Usaha (BMU)
 - 2) Cara mengimplementasikan Program Bantuan Sosial sebagai berikut :
 - a) Penentuan sasaran penerima manfaat dilakukan melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
 - b) Penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer bank, penyaluran langsung, atau melalui agen penyalur resmi.
 - c) Penerima manfaat diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, seperti penggunaan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mengikuti kegiatan pendampingan.
- b. Bantuan Kesehatan
 - 1) Jenis bantuan:
 - a) Kartu Indonesia Sehat (KIS)

- b) Kartu Lansia Terlantar (KLT)
 - c) Bantuan Penguatan Jaminan Kesehatan (BPJK)
 - d) Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (BJKPD)
- 2) Cara mengimplementasikan Program Bantuan Kesehatan sebagai berikut:
- a) Penerima manfaat bantuan kesehatan didaftarkan ke program JKN-KIS melalui Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
 - b) Penerima manfaat dapat memanfaatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
 - c) Dinas Sosial DIY melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan kesehatan.
- c. Bantuan Rehabilitasi Sosial
- 1) Jenis bantuan:
- a) Rehabilitasi sosial dasar
 - b) Rehabilitasi sosial lanjutan
 - c) Asistensi sosial
 - d) Bantuan alat bantu rehabilitasi
- 2) Cara mengimplementasikan program bantuan rehabilitasi sosial sebagai berikut:

- a) Penerima manfaat bantuan rehabilitasi sosial diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
 - b) Bantuan rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.
 - c) Penerima manfaat diwajibkan untuk mengikuti proses rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhannya.
- d. Bantuan Perlindungan Anak
- 1) Jenis bantuan:
 - a) Penguatan keluarga
 - b) Pencegahan dan penanganan anak terlantar
 - c) Rehabilitasi sosial anak terlantar
 - d) Asistensi sosial anak terlantar
 - 2) Cara mengimplementasikan Bantuan Perlindungan Anak sebagai berikut:
 - a) Penerima manfaat bantuan perlindungan anak diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
 - b) Bantuan perlindungan anak diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.
 - c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan anak.

e. Bantuan Perlindungan Lansia

1) Jenis bantuan:

- a) Bantuan sosial lansia
- b) Rehabilitasi sosial lansia
- c) Asistensi sosial lansia

2) Cara mengimplementasikan Bantuan Perlindungan Lansia sebagai berikut:

- a) Penerima manfaat bantuan perlindungan lansia diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
- b) Bantuan perlindungan lansia diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.
- c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan lansia.

f. Bantuan Perlindungan Penyandang Disabilitas

1) Jenis bantuan:

- a) Asistensi sosial penyandang Disabilitas
- b) Rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas
- c) Bantuan alat bantu rehabilitasi

2) Cara mengimplementasikan Bantuan Perlindungan Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

- a) Penerima manfaat bantuan perlindungan penyandang Disabilitas diidentifikasi melalui pendataan dan verifikasi oleh Dinas Sosial DIY dan instansi terkait.
- b) Bantuan perlindungan penyandang Disabilitas diberikan dalam bentuk layanan, barang, atau uang.
- c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program perlindungan penyandang Disabilitas.

g. Bantuan Bencana

- 1) Jenis bantuan:
 - a) Bantuan logistik
 - b) Bantuan keuangan
 - c) Bantuan pemulihan sosial
- 2) Cara mengimplementasikan program Bantuan Bencana sebagai berikut :
 - a) Bantuan bencana diberikan kepada korban bencana alam atau sosial melalui koordinasi dengan instansi terkait.
 - b) Bantuan bencana diberikan dalam bentuk logistik, keuangan, atau pemulihan sosial.
 - c) Dinas Sosial DIY melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program bantuan bencana.

3. Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Program Jaminan Sosial

a. Peran Dinas Sosial dalam Sistem Jaminan Sosial

Dinas Sosial memiliki peran penting dalam implementasi sistem jaminan sosial. Mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mendaftarkan peserta jaminan sosial, mengelola data peserta, serta menyediakan layanan sosial bagi peserta yang membutuhkan (Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. 2015).

Menurut Ignatius Sukanto pada saat di wawancara, bahwa Dinas Sosial memang memiliki peran yang sangat penting dalam sistem jaminan sosial. Dinas sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua masyarakat yang memenuhi syarat mendapatkan akses terhadap program-program jaminan sosial yang tersedia, peran krusial ini dalam berbagai aspek program jaminan sosial, mulai dari perumusan kebijakan hingga penyaluran manfaat.

Berikut merupakan peran penting Dinas Sosial dalam implementasi program jaminan sosial, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan: Dinas Sosial berperan dalam merumuskan kebijakan jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 2) Sosialisasi dan edukasi: Dinas Sosial bertanggung jawab untuk mensosialisasikan program jaminan sosial kepada masyarakat dan memberikan edukasi tentang pentingnya jaminan sosial.

- 3) Pendaftaran dan verifikasi peserta: Dinas Sosial membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta program jaminan sosial.
- 4) Penyaluran manfaat: Dinas Sosial bertugas untuk menyalurkan manfaat program jaminan sosial kepada peserta yang berhak.
- 5) Monitoring dan evaluasi: Dinas Sosial melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan sosial untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.

b. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Program JAMSOS.

Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial. Menurut Ibu Annisa pada saat di wawancara, ada beberapa tugas dan fungsi Dinas Sosial DIY dalam pelaksanaan program jaminan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendataan dan verifikasi terhadap calon peserta program.
- 2) Menyalurkan bantuan sosial kepada peserta program.
- 3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- 4) Memberikan advokasi dan fasilitasi kepada peserta program.
- 5) Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan program jaminan sosial.

c. Manfaat Program Jaminan Sosial di Dinas Sosial DIY

Ignatius Sukamto menyatakan bahwa “ ada beberapa manfaat program jaminan sosial DIY, antara lain peningkatan akses, kualitas hidup lebih baik, Akses terhadap pendidikan juga meningkat dan koordinasi membaik. Berikut peneliti jelaskan :

- 1) Peningkatan Akses: Penelitian menemukan peningkatan jumlah penerima manfaat program jaminan sosial di DIY. Program seperti Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
- 2) Kualitas Hidup Lebih Baik: Penerima manfaat yang diwawancarai menyatakan bahwa program jaminan sosial membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan.
- 3) Akses terhadap pendidikan juga meningkat, terutama pada anak-anak dari keluarga prasejahtera.
- 4) Koordinasi Membaik: Hasil Sudi dokumen menunjukkan adanya peningkatan koordinasi antara Dinas Sosial DIY dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Hal ini terlihat dari mekanisme rujukan yang lebih lancar bagi penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

d. Dampak program jaminan

Program jaminan sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan. Menurut Ignatius Sukanto pada saat di wawancara, bahwa “dampak program jaminan sosial dapat dilihat dari dua aspek utama ekonomi dan sosial”. Peneliti akan jabarkan sebagai berikut :

1) Dampak Ekonomi:

a) Pengentasan Kemiskinan

- Jaminan sosial membantu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat miskin.
- Program seperti bantuan sosial dan jaminan kesehatan dapat membantu mengurangi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar.
- Peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dan peluang kerja, sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

b) Pemberdayaan Masyarakat:

- Jaminan sosial memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat, sehingga mereka dapat lebih fokus untuk meningkatkan taraf hidup.
- Program seperti jaminan ketenagakerjaan dapat membantu pekerja yang mengalami kecelakaan kerja

atau kehilangan pekerjaan untuk kembali bangkit dan produktif.

- Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat.

2) Dampak Sosial:

a) Perubahan Perilaku:

- Jaminan sosial dapat mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka.
- Program seperti jaminan kesehatan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin dan menjaga pola hidup sehat.
- Peningkatan akses terhadap pendidikan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka.

b) Peningkatan Kesejahteraan Sosial:

- Jaminan sosial dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan rasa keadilan sosial.
- Program seperti bantuan sosial dan jaminan pendidikan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin dan rentan.

- Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia masyarakat.

e. Tantangan Implementasi program jaminan sosial

Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY dihadapkan pada beberapa tantangan yang memengaruhi efektivitasnya.

Menurut Annisa Tresnasari Pada saat di wawancara, menyatakan bahwa “salah satu tantangan utama dalam mengaplikasikan program Jaminan Sosial adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan program-program jaminan sosial yang ada. Data menunjukkan bahwa tingkat partisipasi dalam program jaminan sosial masih rendah di kalangan masyarakat DIY, terutama di daerah pedesaan seperti di pedalaman Kabupaten Gunung Kidul”

Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, akses informasi, dan kesadaran akan hak-hak sosial juga mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam program-program jaminan sosial. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu adanya upaya yang lebih intensif dalam penyuluhan dan sosialisasi program-program jaminan sosial.

Menurut Soekanto (2019) penyuluhan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang

manfaat dan mekanisme program-program jaminan sosial, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program.

Menurut Ignatius Sukanto pada saat di wawancara, bahwa “dalam melaksanakan program jaminan sosial terdapat beberapa kendala yang di alami oleh Dinas sosial DIY/ Tim pelaksana antara lain keterbatasan Anggaran, keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait”. Peneliti akan menjelaskan sebagai berikut :

1) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk program jaminan sosial dirasa masih belum mencukupi. Hal ini berdampak pada cakupan penerima manfaat dan besaran bantuan yang diberikan.

2) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Jumlah SDM yang menangani program jaminan sosial, khususnya di tingkat kelurahan dan desa, masih terbatas. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara efisien.

Tabel 4.1 Personalia/SDM Bidang Jaminan Sosial DIY

No.	Jabatan	Jumlah SDM
1	Kepala Bidang	1 Orang
2	Jabatan Fungsional	1 Orang
3	Administrator	2 Orang
4	Pelaksana	6 Orang
Total		10 Orang

3) Kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait.

Masyarakat masih ada yang belum mengetahui atau memahami program jaminan sosial yang tersedia. Optimalisasi sosialisasi menjadi penting untuk meningkatkan *inklusifitas* program.

f. Solusi dalam tantangan implementasi

Menurut Ignatius Sukanto pada saat di wawancara, bahwa ” ada beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar implementasi jaminan sosial lebih optimal untuk meningkatkan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY, antara lain Peningkatan Anggaran, peningkatan sumber daya manusia, Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait, Penggunaan Teknologi dan informasi, partisipasi masyarakat dan Evaluasi dan monitoring”.
Peneliti akan jelaskan sebagai beriku :

1) Peningkatan Anggaran

Menyarankan agar Dinas Sosial DIY mengusulkan anggaran yang memadai untuk mendukung program-program jaminan sosial.

Menyebutkan bahwa anggaran yang memadai akan memungkinkan program-program jaminan sosial berjalan lebih lancar dan efektif.

2) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Menyarankan pelatihan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program jaminan sosial.

Memaparkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas implementasi program.

3) Peningkatan Koordinasi Antar Instansi Terkait

Mengusulkan adanya forum koordinasi rutin antara Dinas Sosial DIY dengan instansi-instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.

Menyebutkan bahwa koordinasi yang baik akan mempermudah pertukaran informasi dan koordinasi antar program, sehingga meningkatkan efektivitas implementasi program.

4) Penggunaan Teknologi dan Informasi

Menyarankan pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem informasi manajemen, untuk mempermudah pelaporan, monitoring, dan evaluasi program.

Mengemukakan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi program.

5) Partisipasi masyarakat

Mengusulkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program jaminan sosial. Menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat akan memperkuat akar rumput program, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan efektivitas program.

6) Evaluasi dan monitoring

Menyarankan adanya evaluasi dan monitoring rutin terhadap program-program jaminan sosial di DIY. Memaparkan bahwa evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan akan membantu dalam mengidentifikasi .

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan pembahasan mengenai latar belakang penelitian, teori-teori yang digunakan, dan metode penelitian yang diterapkan, bab ini akan memaparkan hasil penelitian kualitatif yang telah dilakukan. Temuan penelitian ini disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam subbab ini, peneliti akan menguraikan hasil yang diperoleh dari proses wawancara mendalam dengan petugas Dinas Sosial (DINSOS) dan penerima program bantuan sosial. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada beberapa temuan penting yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada tanggal 6 dan 15 Maret 2024 di Bidang Sosial Dinas Sosial Yogyakarta. Antara lain sebagai berikut :

1. Program jaminan Sosial DIY

Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial oleh negara yang diwujudkan dalam suatu sistem yang bertujuan untuk memberikan kepada peserta jaminan sosial dan keluarga peserta suatu kepastian terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya penghasilan.

Program jaminan sosial diselenggarakan oleh negara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada peserta dan keluarga peserta terhadap risiko sosial yang dapat terjadi. Risiko sosial yang

dimaksud adalah peristiwa yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya penghasilan,

Dinas Sosial DIY menjalankan berbagai program jaminan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program-program tersebut meliputi:

a. Bantuan Sosial (BANSOS)

Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Jenis BANSOS di DIY antara lain:

- 1) Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- 2) Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
- 4) Bantuan Stimulan Program Keluarga Harapan (BST PKH)
- 5) Bantuan Sosial Tunai (BST)
- 6) Bantuan Modal Usaha (BMU)

b. Bantuan Kesehatan

Bantuan kesehatan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu untuk membantu mereka mendapatkan akses layanan kesehatan. Jenis bantuan kesehatan di DIY antara lain:

- 1) Kartu Indonesia Sehat (KIS)
- 2) Kartu Lansia Terlantar (KLT)
- 3) Bantuan Penguatan Jaminan Kesehatan (BPJK)

- 4) Bantuan Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas (BJKPD)

c. Bantuan Rehabilitasi Sosial

Bantuan rehabilitasi sosial diberikan kepada penyandang disabilitas, korban bencana alam, dan kelompok rentan lainnya untuk membantu mereka kembali hidup mandiri dan bermartabat.

Jenis bantuan rehabilitasi sosial di DIY antara lain:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar
- 2) Rehabilitasi sosial lanjutan
- 3) Asistensi sosial
- 4) Bantuan alat bantu rehabilitasi

d. Bantuan Perlindungan Anak

Bantuan perlindungan anak diberikan kepada anak-anak yang terlantar, terancam, atau dieksploitasi untuk membantu mereka mendapatkan perlindungan dan pembinaan. Jenis bantuan perlindungan anak di DIY antara lain:

- 1) Penguatan keluarga
- 2) Pencegahan dan penanganan anak terlantar
- 3) Rehabilitasi sosial anak terlantar
- 4) Asistensi sosial anak terlantar

e. Bantuan Perlindungan Lansia

Bantuan perlindungan lansia diberikan kepada lansia yang tidak mampu dan rawan terlantar untuk membantu mereka

mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dan layanan sosial.

Jenis bantuan perlindungan lansia di DIY antara lain:

- 1) Bantuan sosial lansia
- 2) Rehabilitasi sosial lansia
- 3) Asistensi sosial lansia

f. Bantuan Perlindungan Penyandang Disabilitas

Bantuan perlindungan penyandang disabilitas diberikan kepada penyandang disabilitas untuk membantu mereka mendapatkan akses layanan sosial, rehabilitasi, dan pemberdayaan. Jenis bantuan perlindungan penyandang disabilitas di DIY antara lain:

- 1) Asistensi sosial penyandang Disabilitas
- 2) Rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas
- 3) Bantuan alat bantu rehabilitasi

g. Bantuan Bencana

Bantuan bencana diberikan kepada korban bencana alam atau sosial untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar dan memulihkan kehidupan mereka. Jenis bantuan bencana di DIY antara lain:

- 1) Bantuan logistik
- 2) Bantuan keuangan
- 3) Bantuan pemulihan sosial

Program Jaminan Sosial lainnya yang dikelola oleh Dinas Sosial DIY termasuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan modal usaha, serta program perlindungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak terlantar, lanjut usia, dan penyandang Disabilitas.

2. Implementasi Program Jaminan di Dinas Sosial DIY

Dinas Sosial DIY memiliki peran penting dalam mengimplementasikan program jaminan sosial bagi masyarakat di wilayahnya. Menurut Ignatius Sukanto pada saat di wawancara, ada beberapa poin penting terkait implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY antara lain sebagai berikut :

a. Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memastikan seluruh masyarakat miskin dan rentan di DIY terdaftar dan mendapatkan manfaat JKN. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pendataan dan verifikasi data masyarakat miskin dan rentan.
- 2) Membantu proses pendaftaran JKN bagi masyarakat miskin dan rentan.

- 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang JKN kepada masyarakat.
- 4) Memfasilitasi pengaduan dan penyelesaian masalah terkait JKN.

b. Program Jaminan Hari Tua (JHT)

Dinas Sosial DIY mendorong para pekerja informal di DIY untuk menjadi peserta JHT. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang JHT kepada para pekerja informal.
- 2) Memfasilitasi proses pendaftaran JHT bagi para pekerja informal.
- 3) Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengadakan program edukasi dan pelatihan bagi para pekerja informal.

c. Program Jaminan Pensiun (JP)

Dinas Sosial DIY memberikan perhatian khusus kepada lansia di DIY yang belum memiliki jaminan pensiun. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pendataan dan verifikasi data lansia di DIY yang belum memiliki jaminan pensiun.
- 2) Membantu proses pendaftaran JP bagi lansia yang belum memiliki jaminan pensiun.

- 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang JP kepada lansia.

d. Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Dinas Sosial DIY bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan seluruh pekerja di DIY mendapatkan perlindungan JKK. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang JKK kepada para pekerja.
- 2) Memfasilitasi proses pendaftaran JKK bagi para pekerja.
- 3) Membantu proses penyelesaian klaim JKK bagi para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

e. Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Dinas Sosial DIY membantu para pekerja yang kehilangan pekerjaan untuk mendapatkan manfaat JKP. Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Melakukan pendataan dan verifikasi data pekerja yang kehilangan pekerjaan.
- 2) Membantu proses pendaftaran JKP bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.
- 3) Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang JKP kepada para pekerja.

- 4) Memfasilitasi pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dapat kembali bekerja.

Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Berbagai program Jaminan Sosial telah dilaksanakan dengan baik, seperti program yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dinas Sosial DIY juga terlibat dalam koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dalam pelaksanaan program JKN dan Jamsostek. Selain itu, Dinas Sosial DIY juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang program jaminan sosial yang ada, serta membantu masyarakat dalam proses pendaftaran dan verifikasi sebagai peserta program.

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial DIY tidak hanya fokus pada pelaksanaan program, tetapi juga pada upaya peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial.

Manfaat program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY sangat signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Peningkatan akses menjadi salah satu hasil yang positif dari program ini.

Dengan adanya program seperti ASPD dan BPNT, jumlah penerima manfaat yang berhasil dijangkau meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program jaminan sosial telah berhasil menjangkau

masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, program jaminan sosial juga memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup masyarakat.

Menurut bapak Agus selaku penerima manfaat pada saat di wawancara, “bahwa program ini membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan. Peningkatan akses terhadap pendidikan juga terjadi, terutama pada anak-anak dari keluarga prasejahtera. Dengan demikian, program jaminan sosial telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat”.

Selain manfaat langsung bagi masyarakat, implementasi program jaminan sosial juga telah memperbaiki koordinasi antara Dinas Sosial DIY dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan.

Hal ini terlihat dari mekanisme rujukan yang lebih lancar bagi penerima manfaat yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Peningkatan koordinasi ini merupakan langkah positif dalam memperbaiki pelayanan sosial bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, manfaat program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY sangatlah besar. Selain meningkatkan akses dan kualitas hidup masyarakat, program ini juga berhasil memperbaiki koordinasi antar instansi terkait. Dengan demikian, program jaminan sosial telah memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan masyarakat DIY.

3. Tantangan Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY.

a. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat

Menurut Annisa Tresnasari selaku pelaksana program jaminan sosial pada saat di wawancara “masih terdapat kendala dalam mengaplikasikan program salah satunya adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dan kebanyakan masyarakat memahami jika semua orang yang di masukan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). berarti sudah pasti menjadi penerima bantuan.

DTKS adalah database yang berisi data penduduk miskin dan rentan di Indonesia. Database ini digunakan sebagai dasar untuk menentukan penerima bansos. DTKS memuat informasi tentang identitas penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan akses terhadap layanan publik. Data DTKS diperbarui secara berkala oleh pemerintah berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi lapangan.

Ibu Annisa Tresnasari menyatakan pada saat di wawancara, bahwa “memasukkan data ke DTKS merupakan langkah awal untuk mendapatkan akses ke berbagai program kesejahteraan sosial. DTKS berfungsi sebagai basis data awal untuk mengidentifikasi masyarakat yang berpotensi memerlukan bantuan, setelah data di masukan maka proses selanjutnya adalah verifikasi dan validasi hal ini berguna untuk memastikan kelayakan penerimaan bantuan”.

Jadi disimpulkan tidak semua orang yang masuk DTKS akan secara langsung menerima bantuan dan hanya mereka yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang di tetapkan oleh pemerintah yang berhak menerima bantuan.

b. Program tidak tepat sasaran

Bantuan Jaminan sosial di DIY, masih sering tidak tepat sasaran di karenakan sebagai berikut :

1) Akses dan Penerapan Program:

- a) Masih banyak masyarakat miskin dan rentan di DIY yang belum terdaftar dan mendapatkan manfaat program jaminan sosial, seperti JKN, JHT, dan JP.
- b) Terdapat kasus di mana orang-orang yang tidak memenuhi syarat program jaminan sosial mendapatkan manfaatnya.
- c) Proses pendaftaran dan pengurusan program jaminan sosial bagi masyarakat masih terkesan rumit dan birokratis.

2) Data dan Informasi:

- a) Data dan informasi tentang masyarakat miskin dan rentan di DIY masih belum lengkap dan akurat.
- b) Kurangnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan data dan informasi.

Ibu Annisa Tresnasari menyatakan pada saat di wawancara, bahwa “adapun Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial adalah perlu lebih intensif dalam penyuluhan dan sosialisasi Aplikasi yang di gunakan oleh DINSOS seperti Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, Aplikasi Pendataan terpadu dan sistem informasi jaminan sosial”. Berikut peneliti akan menjelaskan lebih rinci :

1) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS)

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) adalah platform digital yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengelola dan menyalurkan program kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Tujuan SIKS adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam pengelolaan program kesejahteraan sosial. SIKS memiliki beberapa fungsi utama:

- a) Membuat dan memelihara database penerima bansos: Database ini berisi informasi tentang identitaspenerimabansos, jenisbansos yang diterima,dan status penyaluran bansos.
- b) Memproses pengajuan bansos: SIKS digunakan untuk memproses pengajuan bansos dari masyarakat. Proses ini termasuk verifikasi data pemohon dan penetapan kelayakan penerima bansos.

c) Memonitor penyaluran bansos SIKS digunakan untuk memantau proses penyaluran bansos kepada penerima. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melacak status penyaluran bansos dan memastikan bahwa bansos tepat sasaran.

2) Aplikasi Pendataan Terpadu (APT_{Ter})

APT_{Ter} adalah aplikasi yang digunakan untuk pendataan penerima bantuan sosial secara terpadu. Dengan APT_{Ter}, Dinas Sosial DIY dapat mencatat data penerima bantuan secara lengkap dan akurat, termasuk data demografis, kondisi ekonomi, dan jenis bantuan yang diterima. Aplikasi ini membantu dalam mengelola dan memonitor bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial, sehingga memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efisien.

3) Sistem Informasi Manajemen Program Jaminan Sosial (SIMPJS).

SIM-PJS digunakan untuk mengelola program jaminan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Dengan SIM-PJS, Dinas Sosial DIY dapat mencatat data peserta program, melacak penyaluran bantuan, dan melakukan evaluasi terhadap program-program jaminan sosial tersebut. Aplikasi ini membantu dalam memastikan bahwa program-program jaminan sosial berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang diharapkan kepada pesertanya.

Penyuluhan yang efektif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang manfaat dan mekanisme program-program jaminan sosial, sehingga dapat meningkatkan partisipasi dan efektivitas program”.

Menurut bapak Ignatius Sukampto selaku kepala bidang Jaminan sosial pada saat di wawancara, bahwa ”selain kurangnya partisipasi masyarakat terdapat juga anggaran yang dialokasikan untuk program jaminan sosial di DIY masih belum mencukupi, hal ini mungkin akan memengaruhi cakupan penerima manfaat dan besaran bantuan yang diberikan. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah terus berusaha mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan dan memastikan program jaminan sosial dapat berjalan dengan lancar.

Bapak Ignatius Sukampto juga menyatakan ”bahwa Dinas Sosial DIY mengajak masyarakat untuk bersinergi dan mendukung program jaminan sosial dengan melaporkan jika ada indikasi penyalahgunaan bantuan di aplikasi Cek Bansos”.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menangani program jaminan sosial, khususnya di tingkat kelurahan dan desa, juga masih terasa. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara efisien.

Kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait juga menjadi kendala, di mana masih ada masyarakat yang belum mengetahui atau memahami program jaminan sosial yang tersedia.

4. Upaya Mengatasi Tantangan Implementasi Program Jaminan Sosial

Untuk mengatasi tantangan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY, beberapa solusi telah diusulkan. Antara lain:

- a. peningkatan anggaran untuk mendukung program-program jaminan sosial
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam implementasi program.
- c. peningkatan koordinasi antar instansi terkait, penggunaan teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta
- d. evaluasi dan monitoring rutin terhadap program-program jaminan sosial.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini, diharapkan implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial DIY dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Pembahasan dari Implementasi program jaminan sosial di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), penulis dapat menyimpulkan bahwa di temukan kelemahan dalam proses kegiatannya, yaitu:

1. **Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat:** Salah satu kendala utama adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial. Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang program-program tersebut, serta persepsi yang salah bahwa semua yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan secara otomatis menjadi penerima bantuan. Padahal, proses penerimaan bantuan melalui DTKS melibatkan verifikasi dan validasi data untuk memastikan kelayakan penerimaan.
2. **Program Tidak Tepat Sasaran:** Meskipun program jaminan sosial di DIY telah dirancang untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, masih terjadi ketidaktepatan sasaran. Beberapa masalah yang terjadi adalah akses dan penerapan program yang belum merata, terdapatnya orang-orang yang tidak memenuhi syarat namun menerima manfaat, serta proses pendaftaran yang dianggap rumit dan birokratis oleh masyarakat.

3. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): SDM yang terlibat dalam implementasi program jaminan sosial, terutama di tingkat kelurahan dan desa, masih terbatas. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran, verifikasi, dan penyaluran bantuan secara efisien.
4. Kurangnya Koordinasi Antar-lembaga Terkait: Koordinasi antar-lembaga terkait dalam pengelolaan program jaminan sosial masih belum optimal. Kurangnya koordinasi ini dapat mengakibatkan kurangnya informasi yang akurat dan lengkap tentang masyarakat miskin dan rentan, serta kesulitan dalam mengelola data dan informasi yang diperlukan untuk program-program tersebut.
5. Keterbatasan Anggaran: Anggaran yang dialokasikan untuk program jaminan sosial di DIY masih belum mencukupi. Hal ini dapat memengaruhi cakupan penerima manfaat dan besaran bantuan yang diberikan. Pemerintah perlu terus mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini agar program jaminan sosial dapat berjalan dengan lancar.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal berikut :

1. Dinas Sosial DIY harus meningkatkan Partisipasi Masyarakat Melalui sosialisasi yang efektif, agar masyarakat dapat diberikan pemahaman

yang lebih baik tentang program-program jaminan sosial sehingga partisipasi masyarakat dapat meningkat.

2. Dinas sosial DIY harus meningkatkan Penggunaan Teknologi Informasi karena Pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS) dan Aplikasi Pendataan Terpadu (APT_{er}), dapat membantu dalam pengelolaan data penerima manfaat dan penyaluran bantuan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
3. Dinas sosial DIY meningkatkan Kualitas SDM karena Diperlukan peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam implementasi program jaminan sosial agar program ini bisa berjalan sesuai dengan harapan, adapun cara untuk meningkatkan kualitas SDM ini bisa melalui pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
4. Peningkatan Koordinasi Antar-lembaga ini Perlu dilakukan untuk mempererat koordinasi antar-lembaga terkait, termasuk penyedia layanan kesehatan, pemerintah daerah, dan lembaga lainnya, untuk memastikan informasi yang akurat dan lengkap tentang masyarakat sasaran.
5. Pemerintah perlu meningkatkan alokasi Anggaran untuk mendukung program-program jaminan sosial agar dapat mencakup lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hill, M., & Hupe, P. (2009). Implementasi kebijakan publik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, S. (2019). Partisipasi masyarakat dalam program jaminan sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 2(1), 10-25.
- Koehler, D. J., White, M. P., & Bunnell, D. W. (2016). Kelompok Politik sebagai Tempat Terjadinya Implementasi Kebijakan: Keragaman, Kepemimpinan, dan Komunikasi dalam Kelompok Kebijakan Implementasi. *Jurnal Studi Kebijakan*, 44(4), 435-458.
- Fountain, J. E. (2018). *Membangun Negara Virtual: Teknologi Informasi dan Perubahan Institusional*. Penerbit Brookings Institution.
- Van den Heuvel, W. J. A. (2015). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Administrasi Publik*. Penerbit Edward Elgar.
- Gronnoet, H., & Skovgaard, O. (2018). Pembelajaran Kebijakan, Adaptasi, dan Perubahan Kebijakan dalam Konservasi Alam di Denmark. *Kebijakan Lingkungan dan Tata Kelola*, 28(1), 1-14.
- Lindquist, E. A., & Laver, M. (2016). *Melaksanakan Reformasi Administrasi di Negara Berkembang*. Penerbit Springer.
- Bass, B. M., & Avolio, B. J. (2015). *Kuesioner Kepemimpinan Multifaktor MLQ: Sampel Set (Jilid 3)*. Penerbit Mind Garden, In.

- O'Reilly, C. A., & Chatman, J. (2016). Budaya sebagai Kontrol Sosial: Perusahaan, Sekte, dan Komitmen. *Penelitian dalam Perilaku Organisasi*, 8(1), 157-200.
- Handayani. (2023). *Jaminan Sosial di Indonesia: Tinjauan Asuransi Sosial*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Creswell, J. W. (2014). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi ke-4)*. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2010). Konsep jaminan sosial. *Jurnal Sosial & Budaya*, 5(2), 45-60.
- Setiawan, B., & Usman, S. (2017). Sejarah dan perkembangan sistem jaminan sosial di Indonesia. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 10(2), 120-135.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Analisis Tematik dalam Penelitian Kualitatif. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Dja'an Sotori dan Aan Komariah. (2009). *Pengantar Penelitian dalam Pendidikan*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Syaodin N. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hammersley, M., & Atkinson, P. (2007). *Etnografi: Prinsip-prinsip dalam Praktik (Edisi ke-3)*. PT Pustaka Pelajar.

- Soekanto, S. (2019). *Penyuluhandan Transaksi Program Jaminan Sosial*. Jakarta PT Rajawali Grafindo Persada.
- Nurhayati. (2018). Partisipasi Masyarakat dalam Program Jaminan Sosial. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 10(2), 78-92
- Ahmad. (2020). Kesadaran Masyarakat tentang Perlindungan Sosial. *Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 15(1), 45-57.
- Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta. (2015). *Peran Dinas Sosial dalam Implementasi Program Jaminan Sosial*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

LAMPIRAN 1

Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan untuk Annisa Tresnasari:

1. Bagaimana implementasi dan efektivitas program-program jaminan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial DIY, serta upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, dengan saran untuk meningkatkan efektivitasnya?

B. Pertanyaan untuk Ignatius Sukampto:

1. Bagaimana alokasi anggaran, kecukupan dana, koordinasi instansi terkait, harapan untuk masa depan, dan pesan kepada masyarakat terkait program jaminan sosial yang dikelola oleh Dinas Sosial DIY?

C. Pertanyaan untuk Agus

1. Bagaimana program jaminan sosial membantu Anda dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kesehatan?
2. Bisakah Anda memberikan contoh konkret bagaimana program ini meningkatkan akses Anda terhadap pendidikan?
3. Bagaimana program ini berdampak pada anak-anak dari keluarga prasejahtera dalam hal pendidikan?

LAMPIRAN 2
DOKUMENTASI



